

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Perketat PPKM Mikro



Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali, Pemerintah memberlakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai 6 Juli hingga 20 Juli

mendatang. Hal ini dilakukan, setelah pemberlakuan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli. Pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali diberlakukan pada 43 Kabupaten / Kota yang berada di 20 Provinsi, yang memiliki level asesmen 4. Sedangkan rincian level asesmen atas Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa-Bali yakni: (a) Level 4 sebanyak 43 Kab/Kota; (b) Level 3 sebanyak 187 Kab/Kota; dan (c) Level 2 sebanyak 146 Kab/Kota.

Adapun 43 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali yang masuk Level Asesmen 4, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota	No	Provinsi	Kab/Kota
1	Aceh	Kota Banda Aceh	23	NTT	Nagekeo
2	Bengkulu	Kota Bengkulu	24	Papua	Boven Digoel
3	Jambi	Kota Jambi	25	Papua	Kota Jayapura
4	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	26	Papua Barat	Fak Fak
5	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	27	Papua Barat	Kota Sorong
6	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	28	Papua Barat	Manokwari
7	Kalimantan Tengah	Lamandau	29	Papua Barat	Teluk Bintun
8	Kalimantan Tengah	Sukamara	30	Papua Barat	Teluk Wonda
9	Kalimantan Timur	Berau	31	Riau	Kota Pekanbaru
10	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	32	Sulawesi Tengah	Kota Palu
11	Kalimantan Timur	Kota Bontang	33	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
12	Kalimantan Utara	Bulungan	34	Sulawesi Utara	Kota Manado
13	Kep. Riau	Bintan	35	Sulawesi Utara	Kota Tomohon
14	Kep. Riau	Kota Batam	36	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
15	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	37	Sumatera Barat	Kota Padang
16	Kep. Riau	Natuna	38	Sumatera Barat	Kota Padang
17	Lampung	Kota Bandar Lampung	39	Sumatera Barat	Kota Solok
18	Lampung	Kota Metro	40	Sumatera Selatan	Kota Lubuk L
19	Maluku	Kepulauan Aru	41	Sumatera Selatan	Kota Palembang
20	Maluku	Kota Ambon	42	Sumatera Utara	Kota Medan
21	NTB	Kota Mataram	43	Sumatera Utara	Kota Sibolga
22	NTT	Lembata			

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kepada seluruh Pemerintah Daerah, dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota, untuk disiplin menjalankan aturan PPKM Mikro yang telah ditetapkan. Pemerintah Pusat juga mendorong setiap daerah mematuhi standar pengetatan (*testing*) Covid-19 dari WHO. “Pada PPKM Mikro ini, target jumlah minimal testing harian sudah ditetapkan, jadi tidak ada daerah yang (nanti) mengurangi jumlah testing untuk menekan *positivity rate*-nya. Selain itu juga harus dimonitor kontak erat (*tracing*), karena varian delta ini menyebar lebih cepat,” katanya dalam Konferensi Pers bertema “Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Memperketat PPKM Mikro dan Menegakkan Kedisiplinan Masyarakat”, secara virtual di Jakarta, Rabu (7/7).

Testing perlu ditingkatkan sesuai tingkat *positivity rate* mingguan, dengan target *positivity rate* di bawah 10%. Misalnya Kota Banda Aceh dengan *positivity rate* 49,36 per minggu, maka target jumlah tesnya adalah 592 per hari, demikian juga misalnya di Kota Bandar Lampung dengan *positivity rate* 41,56 per minggu,

maka target jumlah tes 2.333 per hari.

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali, Pemerintah juga terus meminta kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan kapasitas RS khusus Covid-19 menjadi 40%. “Sekarang ini secara nasional rata-rata TT di RS untuk Covid-19 sebesar 28% dari kapasitas. Untuk di Jawa-Bali rata-rata 31% dan di Luar Jawa-Bali 19% dari kapasitasnya, sehingga sekarang didorong untuk mencapai target Kemenkes agar dinaikkan ke 40% dari kapasitas, sekaligus ditingkatkan kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan peralatan kesehatannya,” ujar Menko Airlangga.

Untuk mendukung pelaksanaan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali dan PPKM Darurat di Jawa-Bali, Pemerintah akan memberikan bantuan beras masing-masing 10 kg kepada 20 juta penduduk. Di mana 10 juta akan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Nantinya, program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial dan BULOG.

Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito dan Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mewakili daerah yang melaksanakan pengetatan PPKM Mikro. Kepala BNPB Ganip Warsito mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada setiap institusi dan pengelola keramaian wajib mempunyai Satgas Covid/Tim Penegakkan Prokes yang harus melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui aplikasi monitoring kepatuhan Prokes BLC. “Yang dilaporkan antara lain kapasitas normal dari institusi atau pusat keramaian yang dikelola, lalu jumlah pengunjung harian sebagai bentuk pelaksanaan pengurangan kapasitas sesuai aturan PPKM Mikro. Satuan pelaksana pengawasan prokes lapangan akan melakukan sidak berkala sebagai evaluasi terhadap laporan yang diberikan,” jelas Ganip.

Untuk makin menguatkan pengawasan pelaksanaan prokes di lapangan diperlukan juga penguatan dari 4 pilar, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. “Untuk hulu, kuncinya memang ada di PPKM Mikro, jadi ini diintensifkan 4 pilar untuk menegakkan disiplin prokes, pelaksanaan *testing, tracing, treatment* (3T), serta pengendalian kegiatan masyarakat, selain meningkatkan movev dan kesiapan RS di sisi hilirnya,” tutur Ganip.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring dan evaluasi dari tingkat desa sampai provinsi dengan indikator angka *positivity rate*, tingkat kesembuhan dan kematian, BOR Rumah Sakit, dan juga vaksinasi. “Kami sudah menginstruksikan kepada para Bupati dan Walikota di Provinsi Lampung untuk menghentikan kegiatan kerumunan. Kami juga memantau para Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk tidak main-main dalam penyediaan fasilitas Rumah Sakit,” ucapnya.

Provinsi Lampung merupakan daerah dengan kasus aktif dan BOR tinggi, karena daerah ini merupakan gerbang masuk bagi orang dari Pulau Jawa yang mau ke Pulau Sumatera, dan sebaliknya. Maka itu, Provinsi Lampung juga menjadi salah satu yang memberlakukan pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro. (rep/fsr/hls)
